

Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dan *Good Governance* Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir

Nurdyah Kusuma Putri, Bainil Yulina, Firmansyah

Politeknik Negeri Sriwijaya, Indonesia

dyahhkp@gmail.com, byulina@gmail.com, firmansyahicha2@gmail.com

ABSTRACT.

This study aims to determine the influence of the implementation of Government Accounting Standards and Good Governance on the Quality of Financial Reports of the Regional Government of Ogan Komering Ilir. This research uses a quantitative approach. Data were collected through the distribution of questionnaires to 159 respondents who are financial management officials within the Regional Work Units (OPD) of Ogan Komering Ilir Regency. The data were analyzed using multiple linear regression with the help of SPSS version 25. The results of the study show that both the implementation of Government Accounting Standards and Good Governance have a positive and significant influence on the quality of financial reports. This research emphasizes that the synergy between the implementation of accounting standards and good governance is an important factor in improving the quality of regional financial reporting.

Keywords: Government Accounting Standards, Good Governance, Financial Report Quality, Regional Government

PENDAHULUAN

Dalam era desentralisasi fiskal dan transparansi publik, laporan keuangan pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. Laporan keuangan bukan hanya sebagai dokumen administrative, tetapi juga menjadi dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Oleh karena itu, kualitas laporan keuangan menjadi sorotan utama dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang baik dan dapat dipercaya.

Pemerintah memiliki kewajiban untuk membangun serta mempertahankan kepercayaan publik. Salah satu bentuk realisasi tanggung jawab tersebut adalah melalui transparansi dan akuntabilitas publik yang diwujudkan dalam penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) secara menyeluruh. Untuk itu, pemerintah daerah perlu menyusun laporan keuangan yang tepat waktu dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Kasmir (2019) menyatakan bahwa "laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan suatu entitas pada waktu tertentu dan hasil usaha selama periode tersebut, sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi oleh berbagai pihak".

Fenomena tentang laporan keuangan saat ini semakin menjadi topik yang ramai dibicarakan. Banyak permasalahan terkait kurangnya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Indonesia yang terus menarik perhatian

utama. Masalah ini menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap standar akuntansi pemerintah, kelemahan dalam sistem pengendalian internal, dan kekurangan kemampuan dari staf akuntansi. Hal ini berpotensi memberikan dampak negatif pada kualitas LKPD (Alminanda & Marfuah, 2018).

Tabel 1. 1 Rekap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten

Tahun	Aset (Neraca)	Pendapatan Daerah	Belanja Daerah	SILPA	SAL Awal	Ekuitas Akhir	Arus Kas Operasional
2019	4.354.000	2.248,92	2.216,77	59,97	24,75	3.473.000	727,50
2020	4.652.000	2.234,23	2.199,95	56,84	30,22	3.682.000	801,34
2021	4.820.000	2.435,09	2.373,20	70,23	37,81	3.860.000	870,90
2022	4.662.000	2.630,61	2.511,34	85,71	28,47	4.001.000	912,20
2023	5.090.000	2.759,34	2.642,10	94,12	59,29	4.225.000	938,67

Sumber: Data diolah, 2025

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, yakni dari tahun 2019 hingga 2023, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir menunjukkan kinerja pengelolaan keuangan yang relatif stabil dan positif. Hal ini tercermin dari nilai aset daerah yang terus meningkat dari Rp. 4,354 triliun pada tahun 2019 menjadi Rp. 5,090 triliun pada tahun 2023. Peningkatan ini mencerminkan adanya pertumbuhan dalam kepemilikan sumber daya ekonomi yang dapat digunakan untuk mendukung pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Dari sisi pendapatan daerah, terdapat tren kenaikan yang konsisten, yakni dari Rp2,248,92 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp2,759,34 miliar di tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu meningkatkan kapasitas fiskal, baik melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi. Sementara itu, belanja daerah juga mengalami kenaikan, meskipun tetap terkendali, dari Rp2.216,77 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp2.642,10 miliar pada tahun 2023. Kenaikan belanja ini menunjukkan adanya peningkatan alokasi dana untuk program pembangunan dan pelayanan publik.

Peningkatan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dari tahun ke tahun, yang tercatat pada tahun 2023, yaitu sebesar Rp94,12 miliar, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp85,71 miliar. menunjukkan adanya surplus anggaran yang semakin besar. Hal ini mencerminkan bahwa pemerintah daerah berhasil merencanakan dan mengelola anggaran dengan hati-hati, namun juga bisa menjadi indikasi bahwa beberapa program atau kegiatan yang direncanakan belum sepenuhnya terealisasi atau ada ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Peningkatan SILPA ini bisa menandakan efisiensi dalam penggunaan anggaran, tetapi juga perlu diwaspadai agar tidak mengarah pada pemborosan atau kurang maksimalnya penggunaan dana untuk kepentingan masyarakat.

Selain itu, nilai ekuitas akhir juga menunjukkan tren positif, dari Rp3,473 triliun pada tahun 2019 menjadi Rp4,225 triliun di tahun 2023. Peningkatan ini menandakan bertambahnya kekayaan bersih pemerintah daerah sebagai hasil dari

akumulasi surplus operasional dan koreksi laporan tahun-tahun sebelumnya. Begitu pula dengan arus kas dari aktivitas operasi, yang meningkat dari Rp727,50 miliar di tahun 2019 menjadi Rp938,67 miliar di tahun 2023. Ini menandakan likuiditas pemerintah daerah tetap terjaga dalam menjalankan aktivitas rutinnya.

Tabel 1. 2 Perkembangan Opini LKPD Pemerintah

No	Tahun	Hasil Pemeriksaan
1	2019	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2	2020	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
3	2021	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
4	2022	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
5	2023	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sumber : sumsel.bpk.go.id

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir telah berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama lima tahun berturut-turut, yaitu dari tahun 2019 hingga 2023. Opini ini diberikan karena laporan keuangan daerah dianggap telah disusun sesuai dengan prinsip dan ketentuan dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Hal ini mencerminkan adanya kepatuhan administratif terhadap aturan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual, serta komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kualitas penyajian informasi keuangan secara formal.

Keberhasilan memperoleh opini WTP tersebut belum sepenuhnya mencerminkan bahwa pelaksanaan akuntansi pemerintah di lapangan telah berjalan optimal. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, masih ditemukan berbagai temuan seperti pengelolaan aset yang belum tertib, pencatatan belanja yang tidak sesuai, serta penggunaan kas daerah yang tidak melalui mekanisme resmi. Hal ini mengindikasikan adanya perbedaan antara kesesuaian penyusunan laporan keuangan secara administratif dengan penerapannya secara nyata di lingkungan unit kerja, yang dipengaruhi oleh keterbatasan pemahaman SDM, lemahnya pengendalian internal, serta belum maksimalnya sistem pencatatan keuangan.

Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang tercermin dari capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Transformasi utama terjadi pada tiga aspek kritis: pertama, implementasi sistem SAKD berbasis teknologi yang mampu mengurangi kesalahan manual sebesar 40% dan mempercepat proses rekonsiliasi data. Kedua, peningkatan kapasitas SDM melalui program sertifikasi intensif yang berhasil melatih 68% staf keuangan dalam kurun waktu dua tahun. Ketiga, penguatan sistem pengendalian internal dengan menerapkan mekanisme four-eyes principle dan audit trail digital. Namun demikian, tantangan masih muncul dalam konsistensi penerapan SAP di tingkat OPD, dimana 30% unit kerja masih mengalami kesulitan dalam pengakuan pendapatan hibah dan pencatatan aset strategis.

Pencapaian WTP ini juga didorong oleh komitmen politik bupati yang menjadikan reformasi akuntansi sebagai prioritas, dibuktikan dengan alokasi 15%

dari anggaran pelatihan untuk pengembangan kapasitas akuntansi. Fenomena ini menunjukkan bahwa integrasi antara teknologi, sumber daya manusia kompeten, dan kepemimpinan yang kuat mampu menghasilkan laporan keuangan berkualitas tinggi meskipun memerlukan upaya berkelanjutan untuk menyempurnakan implementasi SAP di seluruh lini pemerintah daerah.

Penerapan prinsip good governance di Kabupaten OKI juga menunjukkan dinamika yang serupa yang tercermin dari pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Capaian ini merupakan hasil dari berbagai upaya perbaikan sistem akuntansi dan tata kelola keuangan daerah. Pemerintah Kabupaten OKI berhasil menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) secara lebih konsisten melalui digitalisasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), yang meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Peningkatan kapasitas SDM menjadi faktor kunci dalam pencapaian ini, dimana jumlah staf keuangan yang tersertifikasi SAP meningkat signifikan dalam waktu singkat. Pemerintah daerah juga memperkuat sistem pengendalian internal dengan menerapkan pemisahan tugas yang jelas dan mekanisme pemeriksaan berlapis. Meskipun demikian, tantangan masih ditemukan dalam hal konsistensi penerapan standar di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dimana beberapa unit masih mengalami keterlambatan dalam penyampaian laporan.

Pencapaian opini WTP ini juga didukung oleh peningkatan partisipasi masyarakat melalui kanal pengaduan online dan forum musrenbang, meskipun respon terhadap keluhan masyarakat masih perlu ditingkatkan. Kolaborasi dengan BPK dan Kemenkeu dalam pembinaan dan pendampingan teknis turut berperan penting dalam perbaikan sistem pelaporan keuangan. Keberhasilan OKI dalam meraih opini WTP menunjukkan bahwa komitmen kuat terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dapat menghasilkan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang signifikan.

Kabupaten Ogan Komering Ilir berhasil meningkatkan kualitas laporan keuangannya. Pencapaian ini didukung penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) digital yang meningkatkan akurasi pencatatan dan percepatan pelaporan. Namun, BPK masih menemukan kendala dalam pengakuan pendapatan hibah dan pencatatan aset tetap, termasuk aset infrastruktur senilai Rp12,5 miliar yang belum tercatat lengkap.

Peningkatan kompetensi SDM menjadi faktor kunci, dengan jumlah staf keuangan bersertifikat SAP naik dari 30% menjadi 65% dalam setahun melalui pelatihan intensif bersama BPK dan Kemenkeu. Meski demikian, 4 dari 12 OPD utama masih mengalami keterlambatan penyampaian laporan, menunjukkan perlunya peningkatan konsistensi penerapan standar.

Pencapaian WTP juga didukung perbaikan sistem pengendalian internal, terutama pemisahan tugas penyusunan dan pemeriksaan laporan. Namun, pengawasan terhadap transaksi non-rutin dan pengelolaan aset masih perlu diperkuat. Keberhasilan OKI menunjukkan bahwa komitmen kuat dalam penerapan

SAP dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan, meski masih diperlukan penyempurnaan berkelanjutan.

Pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) pada tahun 2023 menjadi fenomena penting dalam studi akuntansi sektor publik. Prestasi ini mencerminkan keberhasilan implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) melalui tiga pilar utama: digitalisasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), peningkatan kapasitas SDM dengan sertifikasi 65% staf keuangan, dan penguatan sistem pengendalian internal berbasis teknologi. Namun, pencapaian tersebut belum sepenuhnya merata di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di mana 30% unit kerja masih mengalami kendala dalam penerapan SAP, khususnya terkait pengakuan pendapatan hibah dan pencatatan aset strategis.

Penelitian ini memiliki urgensi akademis dan praktis karena beberapa alasan. Pertama, temuan BPK tentang aset Rp12,5 miliar yang belum tercatat mengindikasikan adanya celah dalam sistem akuntansi meski telah meraih WTP. Kedua, efektivitas peningkatan kapasitas SDM perlu dikaji lebih mendalam, terutama dalam mendukung pengambilan keputusan strategis. Ketiga, penelitian ini penting untuk menguji keberlanjutan pencapaian WTP yang saat ini sangat bergantung pada komitmen politik, serta mengembangkan model implementasi SAP yang dapat diadopsi oleh daerah lain dengan karakteristik serupa. Dengan demikian, studi ini tidak hanya mengevaluasi kesuksesan, tetapi lebih berfokus pada pembelajaran dari praktik terbaik dan tantangan yang masih dihadapi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan data bersifat kuantitatif, artinya data tersebut diperoleh melalui pengukuran dalam bentuk angka atau skala numerik. Sugiyono (2022) menjelaskan bahwa penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang mengeksplorasi suatu populasi atau sampel tertentu, di mana data dikumpulkan menggunakan instrumen penelitian yang sesuai, kemudian dianalisis secara kuantitatif atau statistik untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Menurut Sugiyono (2017), menyatakan bahwa “data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau langsung dari objek penelitian.” Data ini dikumpulkan melalui metode penelitian seperti wawancara, observasi, kuesioner, atau eksperimen yang dilakukan oleh peneliti sendiri. Penelitian akan dilaksanakan di Badan Seluruh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Waktu pelaksanaan penelitian direncanakan selama bulan Maret hingga Juni 2025, dimulai dari proses pengumpulan data hingga analisis. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, serta studi dokumentasi untuk memperoleh informasi yang akurat dan sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian ini terdiri dari 3 variabel yang akan diteliti yaitu Standar Akuntansi Pemerintah (X1), dan *Good Governance* (X2) sebagai variabel independent, lalu Kualitas laporan keuangan (Y) sebagai variabel dependen. Populasi dari penelitian ini yaitu 53 Organisasi Perangkat Daerah yang ada

di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dalam penelitian ini menggunakan sampel jenuh dengan pemilihan sampel menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan kriteria tertentu Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan kuesioner yang disebar sebanyak 53 ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten OKI dengan data primer yang bersumber langsung dari tempat objek penelitian dilakukan.

Setelah data dikumpulkan, dilakukan analisis dengan mengolah data penelitian menggunakan multiple linear regression analysis tools dengan bantuan software SPSS 25. Model persamaan regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Information :

Y = Kualitas laporan keuangan

a = Nilai konstanta

b1 = Koefisien untuk standar akuntansi pemerintah

b2 = Koefisien untuk *good governance*

X1 = Standar akuntansi pemerintah

X2 = *Good governance*

e = *error*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Table 1 Hasil Uji regresi Linear Berganda

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-.300	,115		-2,603	,010		
	X1.1	,645	,077	,393	8,348	,000	,858	1,166
	X2.1	,563	,044	,608	12,917	,000	,858	1,166

a. Dependent Variable: Y1

Berdasarkan tabel hasil regresi linear berganda diperoleh nilai Unstandardized Coefficients X1 sebesar 0,645, X2 sebesar 0,563, dan nilai Constanta sebesar -0,300. Diperoleh hasil persamaan sebagai berikut:

$$\text{Kualitas Laporan Keuangan} = -0,300 + 0,645 \text{ Standar Akuntansi Pemerintah} + 0,563 \text{ Good Governance} + e$$

Dari model regresi tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar -0,300 menunjukkan bahwa jika tidak terdapat penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Good Governance (nilai X_1 dan $X_2 = 0$), maka Kualitas Laporan Keuangan diperkirakan bernilai negatif. Meskipun secara praktis hal ini tidak realistis, konstanta ini berfungsi sebagai titik awal model regresi dan digunakan untuk keperluan perhitungan statistik, bukan untuk interpretasi kondisi nyata di lapangan.
2. Koefisien regresi Standar Akuntansi Pemerintah (X_1), sebesar 0,645 menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1% dalam penerapan SAP akan

meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan sebesar 64,5%, dengan asumsi variabel Good Governance tetap atau tidak berubah. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat penerapan SAP di lingkungan pemerintahan daerah, maka semakin meningkat pula kualitas laporan keuangannya. Pengaruh ini bersifat positif dan signifikan, yang berarti penerapan SAP berperan penting dalam mendorong penyusunan laporan keuangan yang lebih relevan, andal, dan sesuai standar.

3. Koefisien regresi Good Governance (X₂) bernilai 0,563 menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1% dalam penerapan prinsip-prinsip good governance akan meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan sebesar 56,3%, dengan asumsi variabel Standar Akuntansi Pemerintah (X₁) tetap. Hal ini menegaskan bahwa penerapan prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta efisiensi dan efektivitas, memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Semakin baik implementasi good governance, maka semakin tinggi pula mutu pelaporan keuangan yang dihasilkan.

Uji Hipotesis (F Test)

Table 2 Hasil Uji Statistik F

ANOVA ^a						
	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,110	2	,055	185,276	,000 ^b
	Residual	,046	156	,000		
	Total	,157	158			

Sumber: data diolah (2025) SPSS 25 Version

Berdasarkan output di atas diketahui nilai X₁ dan X₂ terhadap Y adalah sebesar $0,000 < 0,05$ dan $F_{hitung} 185,276 > F_{tabel} 3,053$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel Y.

Uji Hipotesis (t-Test):

Table 3 Hasil Uji Hipotesis

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-,300	,115		-2,603	,010		
	X1.1	,645	,077	,393	8,348	,000	,858	1,166
	X2.1	,563	,044	,608	12,917	,000	,858	1,166

a. Dependent Variable: Y1

Sumber: data diolah (2025) SPSS 25 Version

Berdasarkan hasil pengelolaan data dengan menggunakan program SPSS, variabel Standar Akuntansi Pemerintah diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 8,348

sedangkan t_{tabel} 1,975. Sehingga dapat disimpulkan bahwa t_{hitung} 8,348 > t_{tabel} 1,975 yang berarti bahwa variabel Standar Akuntansi Pemerintah (X1) berpengaruh terhadap variabel Kualitas laporan keuangan. Sedangkan, Variabel *Good Governance* diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 12,917 sedangkan t_{tabel} 1,975 dapat disimpulkan bahwa variabel *Good Governance* t_{hitung} 12,917 > t_{tabel} 1,975 yang berarti variabel *Good Governance* (X2) berpengaruh terhadap variabel Kualitas Laporan Keuangan.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Table 4. Results of the Determination Coefficient Test

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.839	0.704	0.700	0,01726

Sumber: data diolah (2025) SPSS 25 Version

Berdasarkan output Model Summary diperoleh nilai R = 0,839, yang menunjukkan bahwa hubungan antara variabel independen, yaitu Standar Akuntansi Pemerintah (X1.1) dan Good Governance (X2.1), terhadap variabel dependen Kualitas Laporan Keuangan (Y1) berada pada kategori kuat karena nilai R mendekati 1. Nilai R Square (R²) sebesar 0,704 mengindikasikan bahwa sebesar 70,4% variasi dalam variabel Kualitas Laporan Keuangan dapat dijelaskan secara simultan oleh kedua variabel independen dalam model, yaitu Standar Akuntansi Pemerintah dan Good Governance. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,700 menunjukkan nilai koefisien determinasi yang telah disesuaikan dengan jumlah variabel independen dan ukuran sampel. Nilai ini sangat dekat dengan nilai R Square, yang berarti model regresi yang digunakan cukup stabil dan tidak terjadi overfitting.

Discussion

1. Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di Kabupaten Ogan Komering Ilir

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, diketahui bahwa variabel Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t_{hitung} sebesar 8,348, yang lebih besar dari t_{tabel} sebesar 1,975, serta nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin baik penerapan SAP di lingkungan pemerintah daerah, maka semakin tinggi pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan

Penerapan SAP yang mencakup kepatuhan terhadap standar, penggunaan basis akrual, klasifikasi akun yang sesuai, serta format dan penyajian laporan yang sistematis, terbukti memberikan kontribusi nyata terhadap keterandalan dan akuntabilitas informasi keuangan. Hal ini sejalan dengan pendapat Mardiasmo (2018) yang menyatakan bahwa penerapan

SAP merupakan dasar dalam menyusun laporan keuangan pemerintah yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Lebih lanjut, nilai rata-rata tanggapan responden sebesar 4,63 terhadap variabel SAP juga menunjukkan bahwa pegawai OPD di Kabupaten Ogan Komering Ilir telah melaksanakan proses pelaporan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Komitmen terhadap penerapan SAP ini memperkuat kualitas informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan, baik dari segi relevansi, keandalan, ketepatan waktu, maupun kepatuhan terhadap peraturan.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dapat diukur tanpa kuesioner melalui analisis dokumen dan observasi. Analisis dilakukan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), serta hasil audit BPK untuk menilai kesesuaian dengan SAP berbasis akrual. Selain itu, observasi langsung terhadap proses pencatatan dan pelaporan keuangan juga memberikan gambaran penerapan SAP di lapangan. Pendekatan ini dinilai lebih objektif karena didasarkan pada data dan bukti nyata.

Temuan ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rahmawati dan Kurniawan (2020) yang menyatakan bahwa penerapan SAP yang baik memiliki pengaruh signifikan terhadap opini audit serta kepercayaan pengguna terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, hasil penelitian ini mempertegas pentingnya implementasi Standar Akuntansi Pemerintah secara konsisten sebagai salah satu faktor utama dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan publik.

2. Pengaruh *Good Governance* Terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Kabupaten Ogan Komering Ilir

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, diketahui bahwa variabel *Good Governance* (X_2) memiliki koefisien regresi sebesar 0,563 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai ini jauh di bawah batas signifikansi 0,05, yang berarti bahwa *Good Governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dengan kata lain, semakin tinggi penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Prinsip-prinsip *Good Governance* yang meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efisiensi, dan efektivitas menjadi pilar penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang profesional dan bertanggung jawab. Temuan ini menunjukkan bahwa ketika OPD menjalankan prinsip-prinsip tersebut secara konsisten, maka hasil pelaporan keuangan yang mereka hasilkan menjadi lebih relevan, akurat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hasil ini sejalan dengan pendapat Suwarno (2021) yang menyatakan bahwa praktik *good governance* dalam sektor publik secara signifikan mampu meningkatkan akuntabilitas fiskal serta kepercayaan publik terhadap laporan keuangan pemerintah. Selain itu, penelitian oleh Fitriana dan Pratolo (2020) juga menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi berperan besar dalam mendukung terciptanya laporan keuangan yang berkualitas dan mendapat opini audit yang baik.

Tingginya nilai koefisien regresi sebesar 0,563 juga menunjukkan bahwa *Good Governance* memiliki kontribusi yang kuat dalam memengaruhi kualitas laporan keuangan, bahkan setelah dikontrol dengan variabel lain. Hal ini menegaskan bahwa penerapan tata kelola pemerintahan yang baik bukan hanya menjadi kewajiban administratif, melainkan juga strategi substantif untuk memperkuat keandalan dan kredibilitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penerapan prinsip-prinsip *good governance* juga dapat diukur melalui beberapa metode alternatif, seperti analisis dokumen resmi pemerintahan (misalnya LAKIP, SAKIP, laporan anggaran, dan notulen Musrenbang) yang mencerminkan aspek transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efisiensi. Selain itu, wawancara mendalam dengan pejabat pemerintah, auditor, atau perwakilan masyarakat dapat menggali praktik nyata penerapan *governance*, sedangkan observasi langsung terhadap proses administrasi dan pelayanan publik dapat mengungkap bukti penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Data sekunder dari lembaga seperti BPK, Kementerian PAN-RB (SAKIP), dan KPK (MCP) juga dapat digunakan sebagai tolok ukur. Dengan menggabungkan metode-metode tersebut melalui triangulasi data, penilaian terhadap *good governance* menjadi lebih valid dan komprehensif.

3. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi pemerintah dan *Good Governance* terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir

Berdasarkan hasil regresi linear berganda yang telah dilakukan, diketahui bahwa nilai konstanta (intersep) dalam model regresi adalah sebesar -0,300. Nilai ini menggambarkan bahwa jika seluruh variabel independen, yaitu Standar Akuntansi Pemerintah (X_1) dan *Good Governance* (X_2), berada pada nilai nol atau tidak diterapkan sama sekali, maka Kualitas Laporan Keuangan (Y) secara teoritis berada pada nilai negatif, yaitu -0,300.

Secara praktis, interpretasi nilai konstanta dalam konteks penelitian ini tidak memiliki makna yang realistis, karena dalam dunia nyata, tidak mungkin suatu organisasi pemerintah daerah benar-benar tidak menerapkan standar akuntansi atau prinsip tata kelola yang baik. Namun demikian, dalam konteks statistik, nilai konstanta tetap penting

sebagai bagian dari pembentukan model regresi, di mana ia berfungsi sebagai titik potong garis regresi pada sumbu Y saat semua variabel independen bernilai nol.

Sebagaimana dijelaskan oleh Ghozali (2018), nilai konstanta dalam regresi linear biasanya tidak ditafsirkan secara substantif, terutama ketika model mencakup variabel-variabel yang secara logis tidak mungkin memiliki nilai nol dalam kenyataan. Oleh karena itu, nilai -0,300 hanya digunakan untuk kepentingan perhitungan model matematis, dan tidak merepresentasikan keadaan empiris pada pemerintah daerah. Dalam hal ini, fokus interpretasi lebih diarahkan pada nilai koefisien regresi dari masing-masing variabel independen yang memiliki makna praktis dan implikatif terhadap kualitas laporan keuangan.

Pengukuran kualitas laporan keuangan tidak hanya dapat dilakukan melalui kuesioner kepada responden, tetapi juga dapat diperoleh melalui pendekatan non-survei yang bersifat dokumentatif dan analitis. Salah satu metode yang lazim digunakan adalah analisis isi laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Melalui analisis ini, peneliti dapat menilai secara langsung karakteristik kualitatif laporan, seperti relevansi, keandalan, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Selain itu, opini audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap LKPD juga menjadi indikator penting untuk mengukur kualitas laporan keuangan. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) mencerminkan bahwa laporan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan bebas dari kesalahan material, sehingga dapat dijadikan acuan objektif. Di samping itu, dokumen pendukung seperti Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), laporan realisasi anggaran (LRA), serta temuan hasil audit dapat dianalisis untuk menilai tingkat kepatuhan, transparansi, dan kelengkapan informasi yang disajikan. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh data yang lebih konkret dan dapat diverifikasi tanpa bergantung pada persepsi individu, serta memungkinkan evaluasi kualitas laporan secara menyeluruh dan mendalam.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan prinsip Good Governance berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Penerapan SAP yang optimal di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terbukti mampu meningkatkan keandalan, relevansi, dan kesesuaian laporan keuangan dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, implementasi prinsip Good Governance melalui transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas turut mendorong terciptanya laporan keuangan yang lebih kredibel dan dapat dipercaya oleh masyarakat maupun pemangku kepentingan. Secara simultan, kedua variabel

tersebut menunjukkan peranan penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah, sehingga kepatuhan terhadap standar akuntansi yang didukung oleh tata kelola pemerintahan yang baik menjadi faktor kunci dalam mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir diharapkan terus memperkuat penerapan SAP dan prinsip Good Governance secara konsisten melalui pelatihan, pendampingan teknis, penguatan sistem pengendalian internal, serta peningkatan kompetensi dan integritas aparatur, sementara peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain seperti pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern, dan kompetensi sumber daya manusia agar hasil penelitian menjadi lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Alminanda, P., & Marfuah. (2018). Peran Komitmen Organisasi Dalam Memoderasi Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dalam *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi* (Vol. 16, Nomor 2). <http://journal.ummg.ac.id/index.php/bisnisekonomi>
- Aminy, R., Pituringsih, E., & Widiastuty, E. (2021). Analisis Penerapan Good Governance, Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Sistem Akuntansi Instansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Komisi Pemilihan Umum se-Nusa Tenggara Barat). Dalam *Valid Jurnal Ilmiah* (Vol. 18, Nomor 2).
- Azizah, R., Yulina, B., & Mubarak, M. H. (2024). Determinan Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Palembang). *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi)*, 10(4), 2640–2651. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v10i4.2807>
- Herawati, T., & Nopianti, D. (2017). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *STAR- Study & Accounting Research*, XIV.
- Iba, Z., & Wardhana, A. (2023). *METODE PENELITIAN* (M. Pradana, Ed.). Eureka Media Aksara.
- Imro'atun Shoimah, Siti Maria Wadayati, Yosefa Sayekti. (2021). Adaptasi Laporan Keuangan pada Entitas Nonlaba berdasarkan Isak 35 (Studi Kasus pada Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo), *Jurnal Akuntansi dan Pajak* Vol 21, No. 02 (2021)
- Kusumawardani, D., & Fitriani, E. (2021). *Pengaruh Kompetensi SDM dan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. *Jurnal Akuntansi dan Audit Publik*, 7(1), 23–34.
- Lantu, F. T., Pangkey, R. I. J., & Sumampouw, O. (2023). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara. *JAIM: Jurnal Akuntansi Manado*, 4(1).

- Lesmono, B., & Siregar, S. (2021). Studi Literatur Tentang Agency Theory. *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)*, 3, 203–210. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v3i2.1128>
- Lestari, P., & Nugroho, H. (2019). *Opini Audit sebagai Cerminan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. *Jurnal Akuntabilitas Publik*, 4(2), 89–100
- Mahartini, N. K. A., Yuesti, A., & Sudiartana, I. M. (2021). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern, Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Karangasem. *JURNAL KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1.
- Mardiasmo. (2018). *AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK-Edisi Terbaru*. CV. ANDI OFFSET.
- Meilani, D., Yulina, B., & Oktarida, A. (2024). Determinan Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi)*, 10(1), 8–21. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v10i1.1786>
- Pratama, A., & Dewi, S. (2020). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Keuangan*, 5(3), 85–96
- Rahmadani, P. D., & Zulaika, N. (2023). Pengaruh Penerapan Sap, Kompetensi Sdm, Dan Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 2.
- Rahmawati, Y., & Yusuf, H. (2019). *Evaluasi Penerapan Good Governance di Lingkungan Pemerintah Kabupaten*. *Jurnal Reformasi Administrasi*, 6(1), 45–58.
- Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Republik Indonesia Pemerintahan*. Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Scott, W. R. (2015). *Financial accounting theory* (7th ed.). Pearson Education Canada.
- Setiawan, A., & Handayani, T. (2020). *Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 10(1), 14–22.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Sutopo, Ed.). CV Alfabeta.
- Suprihatin, N. S., & Ananthi, A. A. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *JURNAL RISET AKUNTANSI TERPADU*, 12, 242–252.
- Tabupook, A. A., & Wulandari, I. (2024). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, 2395.
- Viyurintina, E., & Sisdanto, E. (2024). Good Governance Dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Provinsi Lampung). *JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)*, 2. <https://doi.org/10.62281>
- Wulandari, N., & Sari, D. P. (2021). *Good Governance dan Dampaknya terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. *Jurnal Akuntabilitas Publik*, 5(2), 101–113.